

**PERANAN POLITIK KYAI DALAM PILPRES 2009  
DI PAMEKASAN MADURA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NIAN NURUL IFAN**  
**04370032**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**
- 2. SUBAIDI.S.Ag.M.SI**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ke inginan untuk mengimplementasikan sistem demokrasi dalam tatanan politik dan pemerintahan sangat besar. Salah satu fenomena menaraik pada pemilu 2009, yaitu munculnya kembali para Kiai dalam pentas politik, setelah bebarapa lama tidak muncul pasca selesainya kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid alias Gus Dur yang menjadi presiden ke-IV yang pada waktu itu memperkokoh pencapain elit pesantren. Pencapain ini dinginkan terulang kembali untuk mengembangkan peran Islam sebagai kontrol di dalam pemerintahan, hal ini dibutuhkan peran Kiai sebagai penggerak dalam mencapai visi misi tersebut yang dipandang oleh sebagian masyarakat mempunyai sosok kepemimpinan karismatik.

Penelitian ini mencoba mengangkat suatu permasalahan apa yang melatarbelakangi peranan politik Kiai dalam suksesi terpilihnya Presiden dan wakil Presiden priode 2009-2014. Observasi ini di lakukan di Jawa Timur yaitu; di Kabupaten Pamekasan Madura yang mana di daerah tersebut ikatan kultural Kiai sangat terorganisir dalam mensukseskan Pilpres 2009 di dalam tatanan masyarakat.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan sikripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, Studi Dokumen, Wawancara mendalam (*Dept Interview*). Teknik analisa data.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian ini antara lain, *pertama* Terjunya Kiai dalam politik praktis mampu membawa implikasi terhadap situasi politik yang lebih baik. Kedaan demikian terjadi di dalam penyelenggaraan Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan. Adanya keterlibatan Kiai dalam politik praktis tidak terlepas dengan peranya yang berkewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebab *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan dasar pokok dari tegaknya agama menuju kemaslahatan ummat. Dengan adanya prinsip tersebut keberhasilan Kiai dalam peranannya dibuktikan dengan mendukung salah satu partai politik dan diukur dengan kemenangan yang dicapai oleh SBY-Budiono sebagai Kepala Negara Republik Indonesia priode 2009-2014. Ukuran keberhasilan tersebut dilihat dari indikator Kiai seperti melakukan konsolidasi seluruh Kiai dalam upaya memobilisasi massa untuk memilih Partai Persatuan Pembangunan (ppp), dan pembicaraan mengenai arah politik untuk berafialiasi kepada partai pemerintah yaitu Partai Demokrat. Untuk mensosialisasikan hal tersebut para Kiai melakukan pengajian keliling dan melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat setempat.

*Kedua*, peranan yang dimiliki Kiai tersebut tidak terlepas dari status sosial yang ia miliki di masyarakat (*social market*). Status tersebut yang kemudian membawa keberhasilan Kiai dalam melakukan pendekatan dan mobilisasi massa untuk mendukung pilihan yang dipegang oleh Kiai. Tanpa adanya kedudukan dan status serta kharisma yang dimiliki Kiai, kecil kemungkinan akan bisa berperan sesuai yang diharapkan. Adanya dukungan Kiai kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tentunya dilandasi dengan kepentingan internal para Kiai seperti kesejahteraan ekonomi dan lembaga pendidikan. Selain itu juga merupakan kesepakatan Kiai dengan jalan musyawarah. Terakhir Langkah Kiai dalam menjalankan peranannya tersebut belum bisa mewujudkan kemaslahatan ummat. Artinya secara manusiawi Kiai akan lebih cenderung kepada kelompok yang mengikuti jejak politiknya ketimbang kelompok lain.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Nian Nurul Ifan  
Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nian Nurul Ifan  
NIM : 04370032  
Judul : **Peranan Politik Kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 November 2010 M

Pembimbing I

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag**  
NIP. 19681020 199803 1002



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Nian Nurul Ifan

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nian Nurul Ifan

NIM : 04370032

Judul : **Peranan Politik Kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 November 2010 M

Pembimbing II

**SUBAIDI.S.Ag.M.SI**

**NIP. 197505172005011004**



Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan judul: **Peranan Politik Kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nian Nurul Ifan

NIM : 04370032

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Nopember 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag**

NIP. 19681020 199803 1002

Penguji I

**Drs. Makhrus.M.Hum.**

NIP. 196802021993031003

Penguji II

**Dr. Ahmad Yani Ansori**

NIP. 19731105 199603 1002

Yogyakarta, 10 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

**Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...َ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
و...َ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

### C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ ا...َ ي...	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

### A. Ta'. Marbuṭah

#### 1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudatu al-aṭ fāl

#### 2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat suku>n, transliterasinya adalah /h/



Contoh: طَّلْحَةٌ -ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## B. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

## C. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

#### D. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

#### E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn

#### F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wamaa Muhammadun illā rasūl

## MOTTO

*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

*Maka dengan bersabar segala urusan dan usaha akan tercapai. Amin*

*Ya Robbaalamin*

*By. Nian Nurul Ifan*

## Persembahan

Berangkat dari rasa syukur dan pengabdian kepada Tuhan yang masih  
membraerikanfu kehidupan.....

Stripsi ini ku persembahkan untuk

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberiku motivasi  
sepigit dan fasih sayangnnya dalam setiap hembusan nafasku

Bu Lel-fu yang selalu aku bangga kan berkat dorongan dan  
motivasi nnya membuatku selalu menemukan pintu harapan

Adikku Kamillurahman yang selalu membuatku bisa menatap masa  
depan

Segenap keluarga besarku tercinta

Untuk Almamaterku tercinta.....

Untuk fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أمّا بعد :

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peranan Kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan Madura** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan Politik Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof.Dr.H.Musa Asy'arie.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs.Oktoberrinsyah,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Subaidi, M.Ag Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Dua insan yang sangat mulia yang saya banggakan Ayahanda dan Ibunda tercinta, dan yang telah merawat dan mendidiku sejak masih kecil sampai sekarang, serta segenap keluarga besarku, terutama kepada Buk Lekku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu terus maju.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini telah selesai.
6. Para pengajar atau Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun Paska Sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Adikku, Kamillurrahman yang selalu memberikan motivasi dan semoga kita dapat menjadi anak-anak yang terbaik buat orang tua kita.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 6 November 2010 M

Penyusun

Nian Nurul Ifan.  
NIM: 04370032

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	I
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN.....	II
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KIAI DAN POLITIK DI KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pameksan .....	24
1. Letak Geografis .....	24
2. Letak Wilayah .....	25
3. Penduduk .....	25
4. Potret Pembangunan Kabupaten Pamekasan .....	31
5. Sejarah Kabupaten Pamekasan .....	33

B. Hubungan Kiai dengan Pemerintahan	
di Kabupaten Pamekasan .....	39
1. Politik Lokal Pamekasan Pada Masa Orde Baru .....	39
2. Politik Lokal Kabupaten Pamekasan Pasca Orde Baru	
(orde reformasi hingga sekarang) .....	42
C. Faktor Pendorong Kiai Terjun ke dalam Dunia Politik.....	44
D. Tujuan Kiai Berpolitik di Kabupaten Pamekasan .....	46

### **BAB III PARTISIPASI DAN PERAN KIAI DALAM**

<b>PILPERS 2009 DI PAMEKASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Partisipasi Politik .....	48
B. Peran , Fungsi, dan Kedudukan .....	51
C. Kiai dan Politik .....	56
1. Penegertian Politik .....	56
2. Pengertian Kiai .....	59
3. Eksistensi Politik Kiai di Kabupaten Pamekasan .....	63
D. Peran Kiai dalam pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan.....	69
1. Kampanye Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan .....	69

### **BAB IV PERAN POLITIK KIAI DALAM PILPRES 2009**

<b>DI KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>77</b>
A. Kedudukan Politik dalam Islam .....	77
B. Dinamika Kiai dalam Pilpres 2009 di	
Kabupaten Pamekasan.....	83
C. Peran Kyai dan Hubungannya dengan Masalahah (hifz al-‘Ummah)	
.....	89



1. Pendekatan Kultural (cultural approach) .....	96
2. Pendekatan Struktural (structural approach) .....	97
3. Pendekatan Transendental (transcendent approach) .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-Saran .....	99
<b>Daftar Pustaka</b> .....	101
<b>Lampiran-Lampiran</b>	
1. TERJEMAH TEKS ARAB	
2. TABLE PROSENTASE PERTANYAAN	
3. CURRICULUM VITAE	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu sebagai sarana mengejawantahkan kedaulatan rakyat baru, yang di lembagakan dalam UUD 1945 setelah dilakukan perubahan UUD 45 naskah asli secara eksplisit tidak memerintahkan pemilu. Saat itu pemilu di selenggarakan oleh pemerintah karena menafsir ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menganut paham kedaulatan rakyat dan kemudian berdasar pasal 2 dan pasal 19 pengejawantahannya dilakukan melalui lembaga permusawaratan/ perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaanya lazim dilakukan melalui pemilu. Penjelasan UU No. 15 Thn 1969 tentang pemilu, secara eksplisit menyebutkan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam UUD 1945. untuk melaksanakan azas-azas Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan / perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusawaratan / perwakilan rakyat yang harus membawa hati nurani rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan azas-azas demokrasi pancasila ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Tricahyo. *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (Malang: In-Trans Publishing,2009) hlm.63.

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, keinginan untuk mengimplementasikan sistem demokrasi dalam tatanan politik dan pemerintahan sangat besar. Salah satu fenomena menaraik pada pemilu 2009 adalah munculnya kembali para kiai dalam pentas politik, setelah bebarapa lama tidak muncul. pasca selesainya kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid alias Gus Dur yang menjadi presiden ke-IV yang pada waktu itu memperkokoh pencapain elit pesantren. Pencapain ini dinginkan terulang kembali untuk mengembangkan peran Islam sebagai kontrol di dalam pemerintahan. Peran ini di jalankan oleh para elit kiai yang dipandang oleh sebagian masyarakat mempunyai karismatik.

Istilah kiai merupakan suatu trem yang multi tafsir, namun dalam hal ini penulis menyamakan dengan istilah ulama'. Kiai adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang mana istilah ini bisa disamakan dengan ulama' yang artinya seseorang yang dipandang mempunyai sebagai guru dan ahli agama Islam. istilah kiai di lingkungan masyarakat Islam tradisional di Pedesaan Jawa, dipanggil dengan sebutan kehormatan kiai di dalam ilmu politik disebut <sup>2</sup>Referent power (*charismatic power*) yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang berasal dari sifat-sifat kepribadian dan karekteristik seorang menejer. Kemampuan ini sebagai dasar kesediaan dan kemauan anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan menerima karekteristik kepribadian sebagai hal yang dibutuhkan dalam

---

<sup>2</sup> Haris S, *Politik Organisasi Prespektif Mikro Diagnosa Psikologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 42

kepemimpinan. Sementara di Kabupaten Pamekasan, dimana penelitian ini di lakukan, kata kiai dan ulama' memiliki arti sebagai <sup>3</sup>*Imamah*. Konsep tersebut yang menunjukkan kepada bimbingan kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang kurang baik. yang sama kiai adalah ulama' dan begitupun sebaliknya oleh karena itulah dengan merujuk pada diatas maka dalam penelitian ini istilah kiai di samakan dengan ulama'

Di dalam masyarakat tradisional, kiai mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting sehingga mereka termasuk dalam salah satu elit sosial diantara elit sosial yang lain, tokoh adat, pemerintahan dan raja sebagai elit sosial, tidak jarang seorang kiai mempunyai peran ganda, yaitu sebagai tokoh politik, ekonomi pendidikan dan lain-lainya sekaligus merangkap kiai, kemudian hal tersebut serupa dengan peran para kiai di Madura rata-rata mereka memegang kekuasaan dari sistem struktural di masyarakat. berubahnya sistem tatanan sosial tersebut berimbas pada perkembangan gerakan politik yang mana sosok karismatik memiliki sifat luar biasa dan dapat dipercaya sebagai memimpin kelompok atau organisasi. <sup>4</sup>Di dalam teori sosiologi politik bentuk-bentuk peran tersebut dipetakan menjadi dua klfikasi besar yaitu struktur fisik dan struktur sosial, struktur fisik biasanya lebih dekat dengan letak geografi dan demografi. sedangkan struktur sosial

---

<sup>3</sup> .A.Djazuli. *'Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm.54.

<sup>4</sup> Maurice Duverger, *'sosiologi politik*, (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada,2007). hlm.32

mengacu kepada faktor-faktor yang lebih artifisial, dan yang secara hakiki manusiawi (teknologi, lembaga-lembaga, kebudayaan, dan keyakinan) dan keduanya tidak ada garis tajam untuk di pisahkan. Manusia tidak menggap struktur fisik di dalam bentuk-bentuknya yang asli, material, akan tetapi melalui ide-ide keyakinan, dan tradisi tradisi sosial yang di perolehnya. sehingga patut diketahui bahwasanya di dalam pola kehidupan masyarakat Madura secara umum mengalami pergeseran di dalam memahami kedaulatan hak-hak politiknya. terbukti dengan terbentuknya beberapa organisasi seperti munculnya “ Jamaa’ah Tabligh dan Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, FPI”, dan lembaga Formal seperti; NU, Muhammadiyah, Nahdatul-Wethan dan Pesantren, Lembaga Adat, kiai dan Tokoh-tokoh adat, dan lainnya.

Dalam konteks pembagian inilah, sangat menarik untuk mengelaborasi peran kiai ke dalam dinamika kehidupan publik. Terjunya kiai dalam dunia politik praktis menimbulkan banyak wacana dikalangan masyarakat disaat pilpres 2009 yang sudah kita lewati bersama dalam pesta demokrasi yang telah usai. Bagi sebageian kalangan ada yang kontra dengan kiai berpolitik mengancam dengan keras pergeseran peran yang di lakukan kiai. Mereka mengklaim bahwa seharusnya kiai berkonsentrasi dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Alasannya wilayah kiai merupakan suatu wilayah yang sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh dengan nilai-nilai keihlasan, tanpa tendensi dan ambisi, sedangkan dunia politik adalah profane yang meniscayakan adanya ke pamrihan, penuh muatan

politis, tendensius dan akibatnya kiai akan menjadi alat politik kelompok tertentu. Isu dan kritik tersebut terlontar dari masyarakat pameksan yang tidak sepakat terlibatnya politik kiai dalam pilpres 2009.

Adapun masyarakat yang pro terhadap peran politik kiai mereka berpendapat <sup>5</sup>Dengan terjunnya kiai dalam kancah politik di diharapkan mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual seperti keadilan, persamaan, dan amanah ke dalam kehidupan politik. Adapun alasan tersebut Kiai adalah sebagai warga Negara, artinya Kiai juga berhak ikut terlibat dalam partisipasi politik termasuk juga menjadi pemain politik di level atas. Hak itu di jamin oleh sistem kenegaraan yang demokratis. Hakikat Negara dalam sistem yang demokratis adalah sebuah komunitas besar dengan komunitas-komunitas kecil yang di dalamnya terdapat tempat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Dengan kepentingan dan pandangan politik yang di miliki, Kiai berhak membuat kendaraan politik dan mengendarainya. Dalam konteks inilah, menarik untuk mencermati perkembangan politik di tingkat-tingkat lokal terutama di Kabupaten Pamekasan Madura di mana kebanyakan politisinya adalah tokoh-tokoh pesantren atau para Kiai. Di sadari atau tidak, posisi Kiai sebagai elit politik di tingkat lokal menghadapi beberapa problem. dari beberapa hasil kajian dan diskusi serta di cocokkan di lapangan Kiai yang terjun ke pentas politik praktis, lebih-lebih di tingkat lokal, pada umumnya sedikit memiliki *back-*

---

<sup>5</sup> Ahmad Jukariel-fay, '*Kiai bermain politik, kenapa tidak?*' bersumber dari <http://www.SuaraMerdeka.com> akses tgl 4 oktober 2009

*ground* teoretik maupun pengalaman dalam politik praktis yang memadai. mereka melakukan proses politik dengan cara tradisonal artinya apa yang pernah dialami mereka jalanin sebagai suatu tujuan untuk mencapai proses suksesi politik.

Selain itu, Kiai lebih di akui sebagai kiai dan pengayom masyarakat, benteng moral dan tempat bertanya tentang persoalan permasalahan agama, kerap sekali hal semacam ini di manfaatkan sebagai gerakan politik praktis yang sifatnya *otoritarianisme*. Hal ini di sebabkan penyelesaian masalah-masalah politik tidak sama dengan penyelesaian masalah sosial ke agamaan di tambah lagi klaim-klaim bahwa para Kiai sering kali tidak mampu membedakan wilayah politik dan wilayah agama. Ia mencampur adukan isu-isu agama dan isu-isu politik. Kedua hubungan Kiai sebagai elit politik (lokal) dengan massanya bersifat peternalistik, hubungan guru-murid, dan komunikasi yang di bangun antara keduanya bersifat emosional (kepatuhan). Akibatnya, massa cenderung pasif, pasrah dan tidak kritis terhadap elitnya. Ketiga para Kiai umumnya berperan ganda, disatu sisi sebagai elit politik dan pimpinan pesantren sering kali terabaikan. Tidak sedikit pesantren yang terbengkalai lantaran Kiainya memasuki gerakan politik praktis disaat Pemilu 2009 berlangsung.

Peran Kiai dalam gerakan politik praktis menarik untuk ditelaah, khususnya Kiai Pamekasan yang dalam banyak hal menampilkan gambaran-gambaran seperti di atas. Kendati hampir semua Kiai di daerah ini memiliki

hubungan darah satu sama lainnya, namun pilihan politiknya beragam, ide dan gagasannya cukup berbeda. Dan ikatan emosionalnya sebagai sanak keluarga tidak berpengaruh pada pilihan-pilihan politiknya. kenyataan yang terjadi di lapangan tidak selaras dengan konsep berdemokrasi yang dinamis jujur dan terbuka sehingga mereka cenderung pola gerakan politik Kiai mereka menggunakan <sup>6</sup>politik antagonisme sosial yaitu sering menggunakan stratiakasi konflik kelas sosial. Yang kemudian sifat atau pandangannya lebih melihat pada ras / (keturunan ) sebagai corak berpolitik melihat dinamika politik Kiai di Pamekasan menarik untuk ditelaah sebagai pembenahan gerakan politik yang modernisme dan demokratis yang nantinya sebagai bentuk dari ke arifan lokalnya.

Implementasi dari UU.No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah memberi imbas yang sangat besar bagi Kiai di Pamekasan untuk berkiprah di dunia politik praktis. Puncaknya adalah pemilu 1999, 2004, dan 2009 yang sudah terlaksana beserta pemilihan Bupati yang sudah terlaksana di Kabupaten Pamekasan. Termasuk Bupati Pamekasan itu sendiri di angkat dari golongan Kiai yaitu Kiai (Drs KH Kholilurrahman SH ) pengasuh pondok pesantren Matsaratul Huda Panempan Pamekasan, Kiai Kholilurrahman itu sendiri mempunyai ikatan tali saudara dengan Kiai pengasuh pondok pesantren Bata-Bata dan pondok pesantren Banyu Anyar berangkat dari basis massa tersebut maka terangkatlah profil pemimpin

---

<sup>6</sup> Maurice Duverger, '*soiologi Politik*, hlm. Xx.



kepala bupati di angkat dari golongan Kiai. terpilihnya Bupati dari kalangan Kiai juga berimbas pada struktur pemerintahan dimana pada akhirnya struktur kekuasaan tersebut dijadikan legitimasi untuk melaksanakan gerakan politik Kiai di dalam pemilu 2009

Penelitian ini mencoba mengangkat suatu permasalahan sejauh mana peranan politik Kiai khususnya suksesi terpilihnya Presiden dan wakil Presiden priode 2009-2015. Observasi ini di lakukan di Jawa Timur yaitu; di Kabupaten Pamekasan Madura yang mana di daerah tersebut peranan politik Kiai sangat terorganisir dalam memobilisasi masyarakat.

## **B. Pokok Masalah**

Apa yang melatarbelakangi para Kiai mengambil peran dalam suksesi Pilpres 2009-2014.?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisa secara kritis bagaimana sesungguhnya latar belakang dan landasan ideologis munculnya gerakan politik Kiai dalam suksesi pilpres 2009 di Pamekasan, kemudian bagaimana keberadaanya serta bentuk-bentuk mobilisasi dan implementasinya terhadap gerakan politik dalam sistem berdemokrasi, dalam rangka memenangkan pemilihan kepala negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pola gerakan Kiai yang berda di Pamekasan ini biasa memerankan untuk melihat problem solving yang ada di masyarakat sehingga untuk mengetahui hal tersebut perlunya melakukan pendekatan yaitu : 1 Pendekatan Psikologi Sosial 2. Pendekatan Proses Politik dan 3 Mobilisasi Sumber namun dalam konsep kerangka teori diatas disertai juga beberapa riset yang sudah di lakukan seperti riset Musa asya'ary bersma tim lain yang berjudul " Persepsi Penduduk Jawa tentang Presiden pada Pemilu 2004" menjelaskan bahwa corak orientasi politik mayoritas penduduk Jawa dalam memilih calon presiden 2004 masih berbasis primordial, artinya masyarakat yang notabnya kental dengan corak ke tradisionaln masih menunggu pemimpin (ulama) yang kharismatik. Meskipun pada pemilu 2004 terdapat dua kekuatan politik baru yaitu partai Demokrat dan partai keadilan sejahtera (PKS)

Skripsi saudara Irham Bashori Hasba Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul. " Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabupaten Jember Jawa Timur " dari beberapa unsure data di atas, masih ada beberapa data yang tidak kami cantumkan. kemudian dari data yang kami temukan di atas lalu kami tampung dikarenakan ada kesamaan dalam penulisan skripsi. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai tokoh masyarakat dan tokoh ke agamaan saja, akan tetapi kia juga merupakan figure khusus yang mempunyai andil

yang cukup besar dalam percaturan politik lokal diberbagai daerah apalagi di daerah Kabupaten Pamekasan sangat efektif dalam mobilisasi masyarakat dalam hal pendulungan suara pemilhan, sehingga Kiai selain menjadi tokoh seribu ummat juga menjadi tokoh dengan seribu massa.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Prinsip dasar Islam tentang tentang pengaturan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka secara implisit tentu terkait dengan diskursus \tentang Islam dan negara.<sup>8</sup> Maka dari itu, demi mengkaji pemikiran dan aksi politik Islam tentu tidak dapat dilepaskan dari perspektif *Fiqih as-Siyasah*<sup>9</sup> atau *Siyasah as-Syar'iyah*<sup>10</sup> dalam diskursus *hukum*

---

<sup>7</sup> Irham Bashori Hasba, "Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabupaten Jember Jawa Timur " (Sikripsi Jinayah Syiasah Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

<sup>8</sup> Munawir Sjadzali mengkategorikan aliran yang *concern* terhadap relasi Islam dan negara, meskipun berbeda dalam menggunakan terma aliran ini akan tetapi substansinya sama. Ada tiga aliran dalam hal ini. *Pertama*, aliran *konservatif tradisional*, yang berpendapat Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara karena menurutnya Islam adalah *ad-Din wa ad-Daulah*, tokoh aliran ini ialah Rasyid Ridha dan Al-Maududi. *Kedua*, aliran *integratif modernis*, yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini ialah Muhammad Abduh dan Muhammad Husein Haikal. *Ketiga*, aliran *nasionalis sekuler*, yang mengatakan Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena menurut aliran ini Muhammad tidak pernah mengepalai dan mendirikan negara. Tokoh aliran ini ialah Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 1-2. M. Azhar, *Filsafat Politik*, hlm. 14. lihat juga Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 57

<sup>9</sup> Objek kajian fiqih siyasah atau *Siyasah as-Syari'yyah* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan dasar ajaran agama yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia untuk kebutuhan mereka. Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syari'at*, (AL-Qahirat: Dār al-Anshār, 1977), hlm. 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa, secara garis besar bahasan *Fiqih as-Siyasah* meliputi tiga aspek utama di antaranya: 1) Peraturan dan Perundang-Undangan Negara sebagai pedoman dan landasaan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 2) Pengorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan. 3) Mengatur

*Islam*. Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu hukum yang bersifat *Qath'i* (Syari'ah) dan yang bersifat *Zanni* (fiqih). Karena politik seringkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi maka penyusun memasukkannya dalam kategori fiqih. *Fiqih as-Siyasah* mempunyai dimensi yang sangat luas dalam mengimplementasikan kehidupan bernegara seperti menjamin kemaslahatan, keadilan dan kestabilan.<sup>11</sup> Sehingga secara ideal (*das sein*), siapapun yang ingin membangun, menjalankan, dan mengejawantah pemerintahan yang baik tentu harus berlandaskan pada *Maslahah al-Mursalah*<sup>12</sup> yang substansinya sejalan (sinergis) dengan *maqasid as-syar'iyah*.<sup>13</sup>

---

hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai negara. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Siyasah as-Syar'iyah* sebagai wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996)V: 1626, artikel "Siyasyah as-Syar'iyah".

<sup>11</sup> K.H. Ibrahim Hoesen, "Fiqih Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islamik Klasik", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.2 Vol. IV (1993), hlm. 58. lihat, Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 15.

<sup>12</sup> Menurut Imam Malik *Maslahah al-Mursalah* itu merupakan salah satu dari epistemologi syari'ah. Dengan syarat bahwa: 1) kepentingan umum itu bukanlah suatu hal yang berkaitan dengan ibadat (*transeden*). 2) kepentingan umum itu selaras dan tidak bertentangan dengan nilai dasar Syari'ah (*Al-qur'an* dan *Sunnah*). 3) kemaslahatan umum itu haruslah merupakan kepentingan esensial yang sangat diperlukan. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7

<sup>13</sup> Ada lima lima tujuan dari maqasid as-syariyah tersebut yaitu: 1) memelihara kemaslahatan agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta dan kehormatan. Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

Gerakan politik Kiai yang dikaji dalam penelitian ini lebih mengkrucut dan terarah pada pemetaan terhadap peran sentral figur Kiai dalam ranah sosial dan politik. Terminologi (istilah) “Kiai”, kendati sudah sangat populer dalam relung masyarakat Indonesia, namun secara akademik untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Clifford Geertz pada 1960-an<sup>14</sup> dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ulama dan Kiai. Sedangkan Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah ”Kiai’ dari ”ulama” karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan Kiai cenderung bermain pada tataran kultural.<sup>15</sup>

Karena itu, pada penelitian ini penyusun sengaja menggunakan istilah”Kiai”, bukan ”ulama”, karena analisisnya yang lebih ditekankan pada aspek kultural dari kehidupan figur sosial yang disebut Kiai. Lebih-lebih untuk melihat fungsi sosial-politik dalam konstalasi perpolitikan Indonesia pada pilpres 2009 lalu, sebagaimana yang diperankannya seperti terlihat dalam judul penelitian ini.

Secara ideal, seorang kiai selalu diharapkan berperan sebagai figur moral dan pemimpin sosial. Kehadirannya tentu tidak dapat dipisahkan dengan situasi dan tingkat kondisi umatnya. Seorang kiai mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan beragama di masyarakat.

---

<sup>14</sup> Clifford Geertz, *Abangan, santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (terj), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

<sup>15</sup> Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES. 1987).

Selain dijadikan sebagai pemimpin, ia juga merupakan panutan (*uswah khasanah*) bagi umat<sup>16</sup> dan masyarakat pada umumnya. Sehingga segala macam perbuatan dan perkataanya harus bisa dijadikan suri tauladan yang baik.

Sebagai pelaku dakwah, seorang kiai berkewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebab *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan dasar pokok dari tegaknya agama. Tanpa adanya *amar ma'ruf nahi mungkar*, maka rusaklah iman dan amal serta akan banyak terjadi kemungkaran dan kemaksiatan dalam kehidupan manusia. Manusia sudah tidak akan mengenal lagi agama, yang mereka lakukan hanyalah memperturutkan hawa nafsunya saja.

Sebaliknya apabila musawarah dalam membangun nilai-nilai kebaikan dan mencegah keburukan ditegakkan dengan sungguh-sungguh, maka akan tersebarlah kema'rufan dan hilanglah kemaksiatan ditengah-tengah masyarakat. Janji Allah swt kepada mereka yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar akan diberikan keuntungan yang besar. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: seutama-utama amal ialah *amar ma'ruf dan nahi mungkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan) dan membenci orang yang fasiq(melanggar hukum). Maka siapa yang menganjurkan

---

<sup>16</sup> "Umat" yang dimaksud disini adalah suatu konsep tentang komunitas Islam, yakni komunitas kaum beriman yang diikat oleh kesamaan pandangan tentang keyakinan, kesucian, moral dan spiritual., Untuk lebih jelasnya baca tulisan Muhammad Tholchah Hasan, tentang *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, hal. 205.

kebaikan berarti memperkuat orang mu'min dan siapa mencegah mungkar berarti menghina orang munafiq.<sup>17</sup>

Dengan demikian jelaslah, bahwa sebagai pelaku dakwah seorang kiai sudah seharusnya menunaikan hak tersebut, sebagai tugas dan tanggungjawabnya kepada Allah dan Rasul-Nya.

**a. Sebagai Pembimbing Rohani Umat.**

Sebagai seorang yang telah diberikan kelebihan oleh Allah swt, tentang permasalahan agama, maka sudah seharusnya seorang kiai memberikan bimbingan dan pengajaran kepada umat tentang masalah-masalah agama dengan baik. Sehingga jelas antara yang haq dan yang batil. Tidak selayaknya orang yang berilmu pengetahuan menambah kebodohan orang awam dengan jalan berdiam diri tidak mau memberi peringatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>18</sup> Dalam hal ini pengajaran yang diberikan lebih bersifat praktis.

Dakwah praktis dilakukan berdasarkan kebutuhan secara alami, orang menginginkan, kecukupan, kesehatan, kekayaan, kedamaian, dan kemakmuran material, namun untuk memperolehnya kadang-kadang tidak

---

<sup>17</sup> Salim Bahreisy, *Tambihul Ghafilin (Peringatan bagi yang lupa)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992), hlm. 113.

<sup>18</sup> T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kreteria Sunnah dan Bid'ah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.107.

diketahui secara benar. Sehingga dakwah secara praktis mengambil kenyataan tersebut sebagai titik tolaknya.<sup>19</sup>

Dengan demikian seorang kiai, diharapkan mampu untuk memberikan bimbingan moral agama terhadap warga masyarakat, sehingga akan nampak jelas mana perkara yang haq dan mana perkara yang batil. Selain itu seorang kiai juga dituntut untuk dapat memberikan solusi terhadap setiap persoalan kehidupan beragama di masyarakat yang tentunya sesuai dengan aturan syari'at agama.

#### **b. Sebagai Pemimpin dan Pengarah Gerakan Masyarakat.**

Seorang Kiai dituntut untuk selalu tanggap terhadap segala persoalan agama yang terjadi di masyarakat. Sebagai pemimpin seorang kiai harus bisa menjadi motor penggerak dalam kehidupan beragama di masyarakat. Baik dan tidaknya suatu pengamalan ajaran-ajaran agama oleh warga masyarakat sedikit banyak akan tergantung pada para pemimpinnya. Oleh karena itu seorang kiai harus bisa membawa masyarakat kejalan yang benar sesuai dengan tuntunan syari'at.

Selain itu, ia harus bisa membawa masyarakat dapat mewujudkan tujuan dakwah yaitu terwujudnya masyarakat yang menjalankan sepenuhnya ajaran Islam, tercapainya masyarakat yang aman dan damai, sejahtera lahir

---

<sup>19</sup> Amrullah Achmad, *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Bidang Penerbitan PLP2M, 1985), hlm. 18.



dan batin adil dan makmur serta berbakti sepenuhnya kepada Allah swt untuk mencapai keridhan-Nya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan dan peranan kiai dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dan cukup berat. Sebab selain sebagai pelaku dakwah atau pemimpin agama yang memberikan bimbingan moral kepada masyarakat, ia juga dituntut untuk dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Sebagai pelaku dakwah seorang kiai harus berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan tujuan dakwah yang sebenar-benarnya, yaitu terwujudnya masyarakat yang menjalankan sepenuhnya ajaran Islam, tercapainya masyarakat yang aman dan damai, sejahtera lahir dan batin adil dan makmur serta berbakti sepenuhnya kepada Allah swt untuk mencapai keridhaan-Nya.

Fenomena perbedaan perilaku dan gerakan sosial politik di kalangan Kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. *Pertama*, faktor posisi sosial Kiai yang memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Sehingga meskipun secara politis Kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin

---

<sup>20</sup> Helmy Masdar, *Dakwah dalam Alam Pembangunan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1973), hlm. 4.

digunakan.<sup>21</sup> *Kedua*, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, Kiai dipandang memiliki kemampuan "luar biasa" untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap "fatwa" politik yang terakhir untuk diikuti

    Berbicara tentang "gerakan politik Kiai" seyogyanya mendasarkan pada konsep ruang (*space*) dan medan (*field*) terutama untuk mencermati seberapa jauh Kiai memerankan ajaran agama yang diyakininya dalam perilaku sosial politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang berkembang paling tidak sejak dekade 1980-an hingga 2009-an, maka kontribusi dan bahkan partisipasi "Kiai" tersebut ditempatkan dalam ruang sosial yang sedang berkembang di Indonesia menjadi relevan adanya dalam penelitian ini.

    Kerangka seperti itu, persepsi teologis Kiai diletakkan dalam dua ruang yang saling mempengaruhi: 1) ruang ekstern masyarakat Indonesia dan 2) ruang intern diri masing-masing individu, sedangkan fenomena politik nasional yang melingkupi kehidupan sosial Kiai digunakan untuk

---

<sup>21</sup> Studi-studi yang pernah dilakukan terdahulu, seperti Horikoshi (1978), misalnya, menunjukkan kekuatan Kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz (1960) menunjukkan Kiai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh Kiai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Miftah Faridl, Peran Persepsi Teologis dalam Perilaku Sosial Politik Kiai. (Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), hal. 238.

menggambarkan medan sosial yang sedang berlangsung. Sehingga pada konteks demikianlah gerakan politik Kiai dalam Pilpres 2009 di kabupaten Pamekasan dapat dielaborasi serta dieksplorasi secara akademis pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) . yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan menjadikan wawancara sebagai landasan sumber data primer .

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif-analiti* yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang peranan politik kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan Madura.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini (a) Studi Dokumen, (b) Wawancara mendalam (*Depth Interview*). (c) Teknik analisa data.

1. Studi dokumentasi, adalah penyelidikan sesuatu peristiwa yang sangat penting yang merupakan suatu alat untuk pengumpulan data. yang kemudian dilakukan dengan proses mentela'ah isi dari data tersebut.

2. Wawancara mendalam “(*Depth Interview*)”. Teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung (tatap muka). Dengan beberapa Kiai dan element masyarakat yang terlibat dalam pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan Madura. Fungsi dari wawancara mendalam adalah membuat Deskripsi dan Eksplorasi oleh karena itu dalam wawancara model ini penelitian akan benar-benar memperhatikan dan melaksanakan faktor penting yaitu 1. Kualitas pewawancara 2 kualitas yang di wawancarai 3 karekteristik dan sifat dari masalah yang di teliti.

### 3. Teknik Analisis Data

Jika data telah terkumpul, di lakukan analisa data secara *Kualitatif* yang kemudian akan di olah dengan cara penyimpulan *deduktif*. Yaitu analisa yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum kemudian di jabarkan dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus, terhadap Peranan Politik Kiai dalam Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan Madura

Penelitian ini di lakukan di Daerah Kabupaten Pamekasan Madura sebagai lokasi tempat di lakukanya penelitaian dengan lama waktu dirasa cukup untuk mengumpulkan sebuah data. Dari bebrapa gambaran metode penelitian. penulis ingin mengetahui latar belakang dan peranan para tokoh gerakan plitik Kiai dalam hal suksesi pilpres 2009 .selain itu pula untuk mengetahui jaringan gerakan politik yang di bangun oleh para tokoh Kiai,

baik melalui jaringan formal maupun jaringan informal dengan hubungan antar individu.

Setelah pengumpulan semua data diperoleh. Tahap selanjutnya proses analisa di lakukan, kemudian metode analisa tersebut difungsikan untuk menganalisis secara kritis terhadap data yang relevan untuk di tuangkan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I, Pendahuluan akan menjelaskan mengenai Latar Belakang, yang berisi tentang alasan mengapa penelitian ini penting di lakukan dan ketertarikan dengan “Peranan Politik Kiai di Pamekasan dalam Sistem Demokrasi”. Ketertarikan penelitian tersebut di bangun dalam 2 bentuk persoalan, yakni ingin mengelaborasi latar belakang munculnya; “Peran Politik Kiai dengan Sistem Demokrasi dan Masyarakat Islam di Pamekasan, dan proses dialektika antara Peranan Politik Kiai dengan Partai Pemilu dalam Pilpres 2009 di Pamekasan dalam Sistem Demokrasi”.

Selanjutnya untuk membedakan dengan penelitian ini di bangun oleh kerangka pendekatan metodologis . Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Moderenisme dalam mengkaji Gerakan Politik. Dalam rangka mengetahui persoalan tersebut bagaimana hubungan antara gerakan Kiai dan Politik dalam suatu konteks masyarakat Pamekasan di pandang perlu menjelaskan hubungan yang erat antara gerakan Kiai dan politik

dalam Bab II. “Peranan Kiai sebagai Gerakan Politik”, latar belakang munculnya Peranan Kiai, landasan Ideologis serta para tokoh dalam Gerakan Politik di Pamekasan dalam hal ini peranan Gerakan Kiai”. Kiai dalam konteks Masyarakat Pameksaan, Struktur ke Kiaian dalam Masyarakat Pamekasan serta hubungan Kiai, Masyarakat dan Politik di Pamekasan.

Sedangkan Bab III menjelaskan;” Peranan politik Kiai sebagai proses Politik”, dalam hal ini akan membahas proses Politik munculnya Gerakan Politik, bentuk- bentuk mobilisasi dan implementasi dalam Masyarakat, dalam menggalang kekuatan untuk tercapainya tujuan dalam memimpin di Pamekasan. Hal ini tidak terlepas dari keadaan Politik dan pemerintahan pasca Reformasi dalam masa Dua ke pemimpinan. Serta peran partai politik pemenang Pemilu, peran Kiai politisi dalam kepartaian dan lembaga Legeslatif dan sistem politik dan Pemerintah sebelum munculnya Gerakan Politik Kiai dalam memimpin Pamekasan.

Bab IV, membahas tentang Proses Mobilisasi Gerakan Politik Kiai, dalam hal ini Pesantren menjadi pusat Gerakan dan Mobilisasi Ummat”, Serta Kiai menjadi tokoh sentral dan penggerak dari mobilisasi gerakan tersebut. Semua itu juga tidak terlepas dari media dalam pembentukan ideology dan Nilai-nilai dalam Masyarakat. Bentuk-bentuk mobilisasi dan gerakan tersebut tidak lepas dari peran lembaga formal seperti pesantren dan

partai politik, dan lembaga informalnya seperti Jama'ah pengajian, forum para Kiai di Pamekasan dan lain sebagainya.

Bab V selanjutnya dalam bab ini di akhiri dengan menyimpulkan penemuan-penemuan selama proses penelitian di langungkan selain itu juga menawarkan beberapa implikasi bagi pengembangan disiplin Ilmu Politik, khususnya Gerakan Politik dalam kajian Politik Kontemporer dan penutup.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Terjunya Kiai dalam politik praktis diharapkan membawa implikasi terhadap situasi politik yang lebih baik. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan tanggung jawabnya sebagai pengemban amanah yang melekat pada dirinya yaitu menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebab *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan dasar pokok dari tegaknya agama dalam menuju kemaslahatan ummat. Keadaan demikian terjadi di dalam penyelenggaraan Pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan. Yang mana para Kiai membantu memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik bagi masyarakat, seperti memilih seorang pemimpin yang benar didalam wahayana politik demokrasi. Terlepas dari tujuan politik tersebut, Kiai di Kabupaten Pamekasan mempunyai tujuan politik salah satunya kepentingan pemerataan pembangunan pendidikan khususnya pendidikan Pondok Pesantren yang ingin sejajar dalam kanca pendidikan nasional yang merupakan bentuk kesepakatan para Kiai. Selain itu juga faktor kesejahteraan para induvidu Kiai yang masih belum mapan, sehingga berimbas kepada langkah Kiai dalam menjalankan perannya yang masih belum bisa mewujudkan keadilan bersama atau *ḥifdh al-Ummah*. Artinya secara manusiawi Kiai akan lebih cendrung kepada kelompok yang mempunyai kekuatan materil/ekonomi, Dibandingkan dengan sebuah kelompok yang berjuang secara ideaslisme.



## **B. Saran –saran**

Peranan umat Islam dalam pemilihan presiden tahun 2009 dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) kelompok muslim yang menggunakan hak pilihnya dengan bertindak sebagai gladiator, kegiatan transisi, atau kegiatan petaruh; dan (2) kelompok muslim yang melakukan tindakan apatis (mereka memilih untuk tidak memilih) dan lebih dikenal sebagai kelompok golput. Perubahan yang terjadi di tubuh partai-partai Islam begitu cepat sehingga kurang tersosialisasikan kepada publik. Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa politisi muslim-santri cenderung inkonsisten antara pernyataan dengan tindakan politik yang mereka lakukan. Inkonsistensi ini bisa dijadikan alasan oleh para pendukungnya untuk tidak memilih lagi partai-partai tersebut pada pemilu yang akan datang. Kegiatan politik dengan menampilkan kesalahan secara individual dan sosial memberikan secercah harapan akan masa depan partai-partai yang ber-asaskan Islam. Oleh karena itu, virus pola pengkaderan dan pembinaan mental kelompoknya harus segera ditularkan kepada ormas dan partai Islam lain agar politisinya terhindar dari KKN dan dapat membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perlu diingat oleh segenap umat Islam, bahwa partai politik bukanlah satu-satunya alat perjuangan bagi umat Islam dalam membela hak-hak mereka. Seperti hak hidup dengan layak, mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang memadai, dan hak-hak lainnya. Yang lebih utama

lagi, bagaimana umat Islam terbebas dari dua penyakit utama yang kini membelenggu mereka, yaitu kemiskinan dan ke-bodohan. Paling tidak partai-partai yang mengusung dua isu ini sebagai tujuan perjuangan mereka, besar kemungkinan akan meraih kemenangan di ajang pesta demokrasi selanjutnya. *Wallahu a'lam bissawwab.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahan, Madinah: *Mujamma' al-Malik Fahd li Thaba'at Mushaf as-Syarif*, 1415 H

at-Thabāri, Imaduddin Ibn Muhammad, *Aḥkām al-Qur'an*, cet. Ke-1 Beirut : Dār al-Kutub al- Alāmiyyah, 1405 H/1985 M

### B. Kelompok Hadits

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār -alFikr, 1981.

Dāwud, Abū, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Dār -alFikr, 1994

At-Tirmidzi, *al-Jami dalam CD al-Mausū'ah al-Hadiṣt al-Syarīf*; nomor 443

### C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

al-Mawardi, Abu Hasan, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut : Dar al-Fikr,t.t.

Djazuli, H.A., *Fiqh Syiasah ; Implementasi Kemaslahatan Ummah dalam Rambu-Rambu Syari'ah* bandung : kencana 2003

Khallāf, Abdul al-Wahab, *Ilmu Uṣhūl Fīqh*, cet. Ke-11 Kairo : Dār al-Qalām,1977

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-Syāri'āt*, AL-Qahirat: Dār al-Anshār, 1977

Hoesen, Ibrahim, “Fiqh Siyasi dalam Tradisi Pemikiran Islamik Klasik”, *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.2 Vol. IV (1993),

Hurairah, Abū, *Uṣhūl Fīqh*, Beirut : Dār al fikr : t.t

Salim, Abdul Mu-in, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Uman, chaerul dkk, *Ushul Fiqh I*, Bandung : Pustaka Setia, 1998

#### **D. Kelompok Lain-lain**

- Achmad, Amrullah, *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Bidang Penerbitan PLP2M, 1985
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Kreteria Sunnah dan Bid'ah* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Bahreisy, Salim, *Tambihul Ghafilin (Peringatan bagi yang lupa)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1992
- Chinoy, Elly, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,
- Dhofier, Zamakhsyari, “ *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai Dalam Jembatan Suramadu Respon Terhadap Industrialisasi*”, Yogyakarta ; LKPSM,1996
- Geertz, Clifford, *Abangan, santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (terj), Jakarta: Pustaka Jaya, 1981
- Horikhosi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, ter. Umar basalim dan Andi Muarly Sunrawa, Jakarta : P3M, 1987
- Horikoshi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES. 1987
- Linton, Ralph, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1984
- Masdar, Helmy, *Dakwah dalam Alam Pembangunan Semarang*: CV. Toha Putra, 1973
- Masturi, “ Pemilu di Kabupaten Pamekasan Berjalan dengan lancar “ Koran Madura edisi senin 20 Juli 2009
- Rumadi, Masyarakat *Post-Teologi Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, Jakarta: Gugus Press, 2002
- Sobari, Muhammad, *Membaca dengan Sikap Total dan Empati, Kiai Nyntrik Membela Pemerintah*, Yogyakarta : LKiS. 1997
- Soekanto, Soerjono dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1988

- Soekanto, Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta K CV, Rajawali, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1984
- Soryono, Djoko, “ Tradisi Dalam Histografi Jawa : Pengaruh Islam di Jawa “ tulisan ini disampaikan pada seminar pengaruh Islam terhadap budaya Jawa, 32 November 2008
- Salim, Pater (ed), *Tolcott Parsons dan Pemikirannya ; Suatu Pengantar*, cet .ke.1, Yogyakarta ; Tiara Wacana, 1990
- S Prawiroatmaja, *Bausastra Jawa-Kawi* , Jakarta : Haji Masgung. 1992
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : ajaran sejarah dan pemikiran* edisi ke-5, Jakarta : UI Press, 1993
- Syah, Ismail Muhammad dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* cet. Ke-2, Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu : Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* Malang: In-Trans Publishing,2009
- Zulkarnain, Iskandar dkk, *Sejarah Sumenep*. Sumenep : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumenenp, 2003

#### **E. Kelompok Politik**

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kiai, Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang : Kalimasahadad, 1993
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Budiarjo, Mariam, “ Dasar-dasar Ilmu Politik,” dalam Buchori Muhamad Sukemi,”Partisipasi Politik dan Prilaku Kekerasan di Indonesia

Tinjauan Psikologi Politik” Yogyakarta :  
UNISA,NO61/XXIX/III/2006

- Budiarjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Granindo, 1993
- Dahl, Robert A., *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta : Yayasan Obor,1992
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)V: 1626, artikel "Siyasyah as-Syar'iyah".
- Duverger, Maurice, '*sosiologi politik*, Jakarta Pt Raja Grafindo Persada,2007
- Faridl, Miftah, Peran Persepsi Teologis dalam Perilaku Sosial PolitikKiai. Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* cet ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Hamid, Abdul MZ, Pengasuh Pondok Pesantren Mimbaull Bata-Bata 26 April 2010
- Haris, *Politik Organisasi Prespektif Mikro Diagnosa Psikologis* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Hasba, Irham Bashori, "*Peran Politik Kiai Dan Santri Menjelang Pemilu 2009 Di Kabupaten Jember Jawa Timur* " Sikripsi Jinayah Syiasah Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Komarudin Hidayat dan M Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama ; tafsir kepemimpinan Islam dan dealektika ulama-negara*, Yogyakarta : Jalsutra, 2004
- Kuntowijoyo, Identitas *Politik Umat Islam*, cet. Ke-3, Bandung : Mizan, 1999
- Lidle, R.Wlliam, “ ICM dan Masa Depan politik Islam di Indonesia”, dalam Nasrullah Ali Fauzi (penyunting), *ICM: Antara Status Quo dan Demokrasi*, Bandung: mizan 1995
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E.M, Bandung : Mizan, 1996
- Iskandar, Mohammad, *Para Pengemban Amanah ; Pergulatan Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*, Bandung : Mata Bangsa, tt

- Mun'im, Abdul, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, Jakarta : LSIK, 1994
- Hutington, Samuel P. dan John Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Reinka Cipta, 2001
- Surbakti, Ramalan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Granindo, 1992
- Satibi, Ibi, "Konstestasi politik lokal: Penerapan syariat Islam Pasca Orde Baru di tasikmalaya Jawa Barat," tesis S2 Universitas Gajah Mada (2004)
- Sukemi, Buchory Muh, " Partisipasi Politik dan Perilaku Kekerasan di Indonesia Tinjauan Psikoogi Politik ", Unisia NO 61/XXIX/III/2006
- Zuhri, M., *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasullah* Yogyakarta : LESF, 2004
- Winters, Jeffrey A., " *Ketidakpastian Indonesia di Era Soeharto*", dalam Jeffrey A.Winters, *Dosa-dosa Politik Orde Baru*, Jakarta: Djambatan,1999

#### **F. Kelompok Kamus, Ensiklopedi dan kelompok lain**

- Badudu J.S, *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2003
- Badan pusat statistic-BAPEDA Kab Pamekasan, thn 2008.
- Bappeda Kab. Pamekasan ,thn 2008.
- BPS Kabupaten Pamekasan, Thn 2007.
- <http://ind.lakpesdam-ponorogo.org> akses 20 Februari 2009
- <http://ind.lakpesdam-ponorogo.org> akses 20 Februari 2009
- [http://www. Suara merdeka. Com](http://www.SuaraMerdeka.Com) akses tgl 4 oktober 2009
- Kamus Besar *Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, edis ke-2,cet. Ke-4, Jakarta ; Balai Pustaka, 1995
- Kantor BKKBN Kab Pamekasan, thn 2008.

Kantor Kpu Kabupaten Pamekasan, Thn 2009

Palano, jeck C. dan Robert E. Rigg dkk, *Kamus Analisa Politik* , terj Edi S. Siregar, Jakarta : Rajawali, 1985

Poerwadarminto, W.J.S.,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Pameksan Kamis 9 oktober 2008

Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Pameksan Kamis 9 oktober 2008

Salim, Drs. Peter dan Yeni Salim *Kamus Bahasa Indonesia, Kontemporer* , edisi pertama, Jakarta : Moderen English Press, 1991

Sumber data : BAPPEDA Kab. Pamekasan, Thn 2008.

Sumber Data : BPS Kabupaten Pamekasan, thn 2008.

Sumber Data : Depag Kabupaten Pamekasan, Thn 2008.

Sumber data : Kantor Statistik Kab Pamekasan, Thn 2008.



Lampiran I

TERJEMAH ARAB-LATIN

<b>Hlmn</b>	<b>Ftn</b>	<b>Terjemah</b>
		<b>Bab II</b>
44	43	Dan hendaklah ada diantara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung
<b>Hlmn</b>	<b>Ftn</b>	<b>Terjemah</b>
		<b>Bab IV</b>
79	92	“Imāmah adalah kedudukan/ jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”
85	100	Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangs dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.; sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
86	103	Sesungguhnya kamu melalui tingkatan-tingkatan dalam kehidupan

## Lembaran Pertanyaan

### A. Untuk umum

1. Menurut saudara bagaimanakah proses berjalanya pilpres 2009 di Kabupaten Pamekasan. ?

---

---

2. Menurut saudara bagaimana peran Kyai dalam mensukseskan Pemilu dan Pilpres 2009 di Pamekasan. ?

---

---

3. Bagaimanakah pendapat saudara tentang keterlibatan Kyai dalam politik Praktis khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.?

---

---

4. Menurut saudara bagaimana komitmen Kyai dalam membimbing umat yang bersamaan dalam keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemilu.?

---

---

5. Menurut anda sepakat apakah Kyai yang terlihat dalam politik bias mementingkan kepentingan umat ?

---

---

---

---

## B. Pertanyaan untuk Kyai

1. Menurut anda bagaimana islam memandang politik. .

---

---

2. Sejak kapan Kyai terlibat dalam kegiatan politik Praktis.

---

---

3. Factor apakah yang melatar belakangi Kyai aktif dalam kegiatan politik parktis.

---

---

4. Adakah tujuan yang ingin di capai dari keaktifan dalam politik.

---

---

5. Adakah dukungan Kyai secara khusus dalam Pilpres 2009 di Pamekasan.?

---

---

6. Bagaimana respon dari masyarakat atas terlibatnya Kyai dalam politik Praktis.?\_

---

---

**Daftar nama orang-orang yang diwawancarai**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat tempat tinggal</b>
1.	K.H. Madhani	Podok Pesantren Sumber Bungur Pakong
2.	K.H.Arif Madhani Lc.	Podok Pesantren Sumber Bungur Pakong
3.	K.H. Toyyib Madhani	Podok Pesantren Sumber Bungur Pakong
4.	K.H. Syamsul Arifin	pengasuh pondok pesantren Banyu-Anyar
5.	Drs.Ruba'i	Desa. Pademawu
6.	Ustd. Abu S.Spd	Desa. Larangan
7.	K.H. Abdul Hamid MZ	Pondok Pesantren Mimbaull Bata-Bata
8.	Mohammad Habiburrahman	Desa. Gelis
9.	M. Sayyadi Pranoto	Desa. Batu Ampar
10.	Iskandar .S.Pi	Desa.Tlanakan

## **CURRICULUM VITAE**

Nian Nurul Ifan , dilahirkan di Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Mei 1986, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Mussarra dan Ibuk Sahhinah, dengan alamat Jl Kangan Maduran Besuki, Situbondo.

Setelah menamatkan, Sekolah Dasar Besuki II dan SMPN 1 Banyuglugur, Situbondo. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Sumber Bungur Pakong, Pamekasan, Madura. Setelah itu melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Syiasah (JS.)



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
JL. K.H. AGUSSALIM NO. 44 TELP. (0324) 322336 FAX. 322336  
P A M E K A S A N

**SURAT REKOMENDASI**

Ijin Penelitian / Pengambilan data

Nomor : 072/ 502 /441.406/2010

- Membaca : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 072/20589/203/2010;
- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1972;  
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972;  
Nomor : Gub 187/1972.

Dengan ini kami tidak keberatan memberikan ijin Penelitian :

Nama : **NIAN NURUL IFAN**  
NIK : 04370032  
Prodi : -  
Judul : Peranan Politik Kyai dalam PILPRES 2009 di Pamekasan Madura;  
Lokasi : PP. Bata-bata, PP. Banyu Anyar Timur, PP. Sumber Bungur;  
Lama : 3 ( tiga ) Bulan;

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Surat keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang keterangan ini tidak memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai tersebut di atas.
2. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangan kepada camat setempat.
3. Mentaati tata tertib keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku didalam daerah / desa setempat
5. Lamanya pelaksanaan : 3 ( tiga ) Bulan;
6. Setelah melakukan penelitian sebelum meninggalkan tempat harus terlebih dahulu melaporkan hasil kegiatannya kepada Camat setempat / Pejabat setempat yang berwenang dilokasi penelitian.
7. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah selesai melakukan diwajibkan memberikan laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan.

Pamekasan, 12 Nopember 2010  
A.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PAMEKASAN  
Kabid. Kesbang,

**Drs. H. AFANDI**  
Pembina  
NIP. 195710251983031010

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kapolres Pamekasan di Pamekasan;  
2. Sdr. Pimpinan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
3. Yang bersangkutan;  
Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 Nopember 2010

Nomor : 072/20589/203/2010  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. Sdr. **Bupati Pamekasan**  
di  
**PAMEKASAN**

Up. Kabakesbangpol dan Linmas

Menunjuk Surat : Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY  
Tanggal : 29 Juli 2010  
Nomor : 074/0571/Kesbang/2010

Bersama ini diberitahukan :

Nama : NIAN NUHUL IFAN  
Alamat : Jl. Sapeh 54 Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/ research

Judul : PERANAN POLITIK KYAI DALAM PILPRES 2009  
DI PAMEKASAN MADURA

Pembimbing : 1. Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag  
2. Subaidi, S.Ag. MSi  
Peserta : -  
Waktu : 3 (tiga) bulan  
Lokasi : Kab. Pamekasan

1. Para Peneliti wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
2. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama

Demikian harap menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Kepala Bidang Budaya Politik

**DJONI PURWANTO, SH, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590428 198603 1 010

Tembusan :  
Yth. 1. Sdr. Kabakesbanglinmas Provinsi DIY  
2. Sdr. Yang bersangkutan.